



**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

2025



DISUSUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan Kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas keuangan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026 serta mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan telah tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan visi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala yang telah dihadapi, namun demikian BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dan konsultasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga Dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sidoarjo, Maret 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO



Dr. HERI SOESANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 1988 03 1 002

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan **OPD** untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bappeda memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai Perangkat Daerah yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (sesuai bagian ketiga UU25/2004).

Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 memuat Program/ kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 telah melalui proses penyusunan dan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, RPJMD Tahun 2023-2026 serta

memperhatikan tahapan lima tahunan pada Ranperda RPJPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dasar hukum dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung/ Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 1 Tahun 2023);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud dari penyusunan Dokumen Rancangan Renja Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi urusan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan disusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2024.
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappeda.
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang program dan kegiatan Bappeda Tahun 2024 serta realisasi capaian kinerja dan keuangan Bappeda per 31 Desember Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang peran, tantangan yang dihadapi dan peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang penentuan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang mendukung prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024 beserta dokumen yang dihasilkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penjelasan tentang rencana pembangunan secara sistematis, terarah dan terpadu dengan jenjang perencanaan yaitu jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda yang sementara masih mengacu kepada Draft RPJMD tahun 2016-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan tentang program dan kegiatan Bappeda tahun 2024 yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan, serta total perubahan kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bappeda Sidoarjo pada Tahun 2023 telah melaksanakan 4 (empat) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
50101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	401.501.387,00	96,80
5010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.700.000,00	127.658.625,00	2.041.375,00	98,43
5010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.325.000,00	12.905.000,00	1.420.000,00	90,09
5010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.120.000,00	2.961.900,00	158.100,00	94,93
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.911.964.138,00	8.620.656.830,00	291.307.308,00	96,73
5010120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.547.282,00	2.461.954,00	85.328,00	96,65
5010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.110.000,00	6.975.000,00	135.000,00	98,10
5010120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	447.500,00	421.400,00	26.100,00	94,17
5010120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43.000.000,00	42.643.980,00	356.020,00	99,17
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi	8.749.137,00	8.309.940,00	439.197,00	94,98
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
5010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.655.273,00	28.096.370,00	2.558.903,00	91,65
5010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.343.620,00	1.790.000,00	3.553.620,00	33,50
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.000.000,00	223.300.000,00	11.700.000,00	95,02
5010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.690.000,00	1.560.000,00	130.000,00	92,31
5010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.687.500,00	28.616.500,00	1.071.000,00	96,39
5010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	801.530.034,00	782.318.130,00	19.211.904,00	97,60
5010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.329.675,00	102.488.000,00	3.841.675,00	96,39
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.200.000,00	214.307.094,00	33.892.906,00	86,34
5010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.317.673.528,00	1.297.597.597,00	20.075.931,00	98,48
5010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.500.000,00	80.575.109,00	1.924.891,00	97,67
5010120905	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	14.775.000,00	225.000,00	98,50
5010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.000.000,00	179.720.000,00	4.280.000,00	97,67
5010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	347.600.000,00	344.532.871,00	3.067.129,00	99,12
	Jumlah	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	401.501.387,00	96,80
50102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	38.356.490,00	97,05
5010220103	Pelaksanaan Konsultasi Publik	77.150.000,00	68.810.000,00	8.340.000,00	89,19
5010220104	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	14.412.500,00	14.412.500,00	0,00	100,00
5010220105	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46.675.000,00	46.095.000,00	580.000,00	98,76
5010220107	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	588.971.587,00	575.792.160,00	13.179.427,00	97,76
5010220301	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	274.912.620,00	266.342.400,00	8.570.220,00	96,88
5010220302	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	100,00
5010220303	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	284.717.593,00	277.030.750,00	7.686.843,00	97,30
	Jumlah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	38.356.490,00	97,05

50103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	61.504.666,75	98,47
5010320101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	100,00
5010320102	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.125.000,00	6.887.500,00	237.500,00	96,67
5010320103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	129.125.000,00	128.314.650,00	810.350,00	99,37
5010320104	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	69.500.000,00	69.000.000,00	500.000,00	99,28
5010320105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	406.442.404,00	399.597.854,00	6.844.550,00	98,32
5010320106	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00
5010320107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	313.800.000,00	310.335.900,00	3.464.100,00	98,90
5010320108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	129.300.000,00	96.800.000,00	32.500.000,00	74,86
5010320201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.600.000,00	147.594.000,00	6.000,00	100,00
5010320202	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.641.975,00	15.479.100,00	162.875,00	98,96
5010320203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	100,00
5010320204	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	285.000.000,00	284.136.690,00	863.310,00	99,70
5010320205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.837.500,00	23.037.500,00	1.800.000,00	92,75
5010320206	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	116.275.000,00	115.887.500,00	387.500,00	99,67
5010320207	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00
5010320208	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	400.000.000,00	399.047.220,00	952.780,00	99,76
5010320301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.072.200.000,00	1.070.745.691,00	1.454.309,00	99,86
5010320302	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.391.569,00	26.548.700,00	1.842.869,00	93,51
5010320303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.908.100,00	20.000.000,00	908.100,00	95,66
5010320304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	364.025.000,00	362.852.778,25	1.172.221,75	99,68
5010320305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	224.000.000,00	223.683.648,00	316.352,00	99,86
5010320306	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5010320307	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.050.000,00	17.000.000,00	4.050.000,00	80,76
5010320308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	186.025.000,00	182.793.150,00	3.231.850,00	98,26
	Jumlah	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	61.504.666,75	98,47
50502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	621.187.603,00	594.718.925,00	26.468.678,00	95,74
5050220101	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	264.507.500,00	261.918.925,00	2.588.575,00	99,02
5050220401	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	356.680.103,00	332.800.000,00	23.880.103,00	93,30

	Jumlah	621.187.603,00	594.718.925,00	26.468.678,00	95,74
	Surplus/Defisit	(18.481.816.138,00)	(17.953.984.916,25)	(527.831.221,75)	97,14

Dari Laporan Realisasi Anggaran 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 31 Desember 2023 dengan Belanja Operasi sebesar 97.14% dan Belanja Modal sebesar 98.48%. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel
Evaluasi Renja Tahun 2023
(emonev)**

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	%	90	Rp 0	189,33	Rp 0	84	Rp 12.533.672.687	0	Rp 1.992.019.702	0	Rp 3.763.393.363	0	Rp 2.672.769.672	96,56	Rp 3.703.988.563	96,56	Rp 12.132.171.300	100,00%	96,80%	285,89	Rp 12.132.171.300	100,00%	0,00%
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen	5	Rp 0	10	Rp 0	5	Rp 147.145.000	2	Rp 100.154.125	2	Rp 23.450.600	1	Rp 9.114.000	1	Rp 10.806.800	6	Rp 143.525.525	100,00%	97,54%	16	Rp 143.525.525	100,00%	0,00%
Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang	Laporan	8		13		7		2		2		2		1		7		100,00%		20		100,00%	
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	Rp 0	4	Rp 0	3	Rp 129.700.000	2	Rp 97.783.625	1	Rp 21.245.000	1	Rp 1.854.000	0	Rp 6.776.000	4	Rp 127.658.625	100,00%	98,43%	8	Rp 127.658.625	100,00%	0,00%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	Rp 0	2	Rp 0	1	Rp 14.325.000	1	Rp 1.655.000	1	Rp 1.425.000	1	Rp 6.450.000	1	Rp 3.375.000	4	Rp 12.905.000	100,00%	90,09%	6	Rp 12.905.000	100,00%	0,00%
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	Rp 0	8	Rp 0	4	Rp 3.120.000	1	Rp 715.500	1	Rp 780.600	1	Rp 810.000	1	Rp 655.800	3	Rp 2.961.900	75,00%	94,93%	11	Rp 2.961.900	100,00%	0,00%
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	95	Rp 0	100	Rp 0	94	Rp 8.922.068.920	16,61	Rp 1.264.235.363	86,64	Rp 3.147.048.835	84,81	Rp 1.991.843.538	97,14	Rp 2.227.387.448	285,2	Rp 8.630.515.184	100,00%	96,73%	385,2	Rp 8.630.515.184	100,00%	0,00%
jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	53	Rp 0	102	Rp 0	53	Rp 8.911.964.138	48	Rp 1.260.700.309	48	Rp 3.145.861.335	48	Rp 1.989.620.238	48	Rp 2.224.474.948	48	Rp 8.620.656.830	90,57%	96,73%	150	Rp 8.620.656.830	100,00%	0,00%
jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 2.547.282	1	Rp 1.426.154	0	Rp 0	0	Rp 1.035.800	0	Rp 0	1	Rp 2.461.954	100,00%	96,65%	1	Rp 2.461.954	100,00%	0,00%
jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 0	16	Rp 0	4	Rp 7.110.000	1	Rp 1.687.500	5	Rp 1.187.500	5	Rp 1.187.500	4	Rp 2.912.500	15	Rp 6.975.000	100,00%	98,10%	31	Rp 6.975.000	100,00%	0,00%
jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognos realisasi anggaran	Dokumen	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 447.500	0	Rp 421.400	0	Rp 0	1	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 421.400	100,00%	94,17%	2	Rp 421.400	100,00%	0,00%
Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang	Persen	100	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 43.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 42.643.980	0	Rp 0	100	Rp 42.643.980	100,00%	99,17%	100	Rp 42.643.980	100,00%	0,00%
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	56	Rp 0	0	Rp 0	55	Rp 43.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	53	Rp 42.643.980	0	Rp 0	13,25	Rp 42.643.980	24,09%	99,17%	13,25	Rp 42.643.980	23,66%	0,00%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92	Rp 0	90	Rp 0	Sangat	Rp 1.120.155.564	95,89	Rp 186.835.042	95,3	Rp 189.468.063	97,53	Rp 189.757.800	96,56	Rp 515.430.035	386,28	Rp 1.081.490.940	0.00%	96.55%	476,28	Rp 1.081.490.940	100.00%	0.00%
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	Rp 0	21	Rp 0	1	Rp 8.748.137	1	Rp 1.989.240	1	Rp 1.998.300	1	Rp 1.668.400	1	Rp 2.654.000	4	Rp 8.309.940	100.00%	94.98%	25	Rp 8.309.940	100.00%	0.00%
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp 0	8	Rp 0	2	Rp 30.655.273	2	Rp 4.637.380	1	Rp 4.639.065	3	Rp 4.848.400	1	Rp 13.971.525	7	Rp 28.096.370	100.00%	91.65%	15	Rp 28.096.370	100.00%	0.00%
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	Rp 0	4	Rp 0	1	Rp 5.343.620	1	Rp 850.000	1	Rp 375.000	3	Rp 472.000	1	Rp 93.000	6	Rp 1.790.000	100.00%	33.50%	10	Rp 1.790.000	100.00%	0.00%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp 0	47342	Rp 0	2	Rp 235.000.000	1	Rp 56.650.000	1	Rp 56.600.000	1	Rp 54.750.000	1	Rp 55.300.000	1	Rp 223.300.000	50.00%	95.02%	47343	Rp 223.300.000	100.00%	0.00%
Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	Rp 0	5	Rp 0	2	Rp 7.500.000	1	Rp 3.375.000	1	Rp 0	1	Rp 1.125.000	1	Rp 3.000.000	4	Rp 7.500.000	100.00%	100.00%	9	Rp 7.500.000	100.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	Rp 0	15	Rp 0	24	Rp 1.690.000	3	Rp 360.000	3	Rp 360.000	3	Rp 360.000	3	Rp 480.000	12	Rp 1.560.000	50.00%	92.31%	27	Rp 1.560.000	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	Rp 0	1025	Rp 0	5	Rp 29.687.500	3	Rp 3.700.000	5	Rp 2.529.500	7	Rp 6.237.000	7	Rp 16.150.000	22	Rp 28.616.500	100.00%	96.39%	1047	Rp 28.616.500	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	Rp 0	954	Rp 0	160	Rp 801.530.034	59	Rp 115.273.422	169	Rp 122.966.198	204	Rp 120.297.000	0	Rp 423.781.510	432	Rp 782.318.130	100.00%	97.60%	1386	Rp 782.318.130	100.00%	0.00%
Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	7	Rp 0	0	Rp 0	7	Rp 106.329.675	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	7	Rp 102.488.000	7	Rp 102.488.000	100.00%	96.39%	7	Rp 102.488.000	100.00%	0.00%
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10	Rp 0	0	Rp 0	10	Rp 106.329.675	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	10	Rp 102.488.000	10	Rp 102.488.000	100.00%	96.39%	10	Rp 102.488.000	100.00%	0.00%
Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi	%	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 1.565.873.528	100	Rp 379.826.172	100	Rp 337.639.390	100	Rp 252.057.155	100	Rp 542.381.974	400	Rp 1.511.904.691	100.00%	96.55%	500	Rp 1.511.904.691	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	Rp 0	27	Rp 0	36	Rp 248.200.000	3	Rp 71.509.107	3	Rp 43.083.105	3	Rp 45.198.734	3	Rp 54.516.148	12	Rp 214.307.094	33.33%	86.34%	39	Rp 214.307.094	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	Rp 0	69	Rp 0	36	Rp 1.317.673.528	3	Rp 308.317.065	3	Rp 294.556.285	3	Rp 206.858.421	27	Rp 487.865.826	36	Rp 1.297.597.597	100.00%	98.48%	105	Rp 1.297.597.597	100.00%	0.00%
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 629.100.000	100	Rp 60.969.000	100	Rp 65.786.475	100	Rp 187.353.199	100	Rp 305.494.306	400	Rp 619.602.980	100.00%	98.49%	500	Rp 619.602.980	100.00%	0.00%
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	Rp 0	52	Rp 0	24	Rp 82.500.000	4	Rp 9.449.000	4	Rp 16.549.700	0	Rp 10.803.579	9	Rp 43.772.830	17	Rp 80.575.109	70.83%	97.67%	69	Rp 80.575.109	100.00%	0.00%
Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	Rp 0	0	Rp 0	25	Rp 15.000.000	25	Rp 9.875.000	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 4.900.000	26	Rp 14.775.000	100.00%	98.50%	26	Rp 14.775.000	100.00%	0.00%
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	Rp 0	16	Rp 0	20	Rp 184.000.000	0	Rp 41.645.000	8	Rp 41.700.000	6	Rp 35.805.000	16	Rp 60.570.000	30	Rp 179.720.000	100.00%	97.67%	46	Rp 179.720.000	100.00%	0.00%
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 347.600.000	0	Rp 0	1	Rp 7.536.775	0	Rp 140.744.620	1	Rp 196.251.476	1	Rp 344.532.871	100.00%	99.12%	2	Rp 344.532.871	100.00%	0.00%

Persentase kesesuaian dokumen RKPd terhadap dokumen RPJMD	%	100	Rp 0	200	Rp 0	100	Rp 1.298.209.300	0	Rp 164.798.060	0	Rp 155.167.250	0	Rp 263.806.000	100	Rp 676.081.500	100	Rp 1.259.852.810	100.00%	97.05%	300	Rp 1.259.852.810	100.00%	0.00%
Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan	%	100		180		100		0		0		0		100		100		100.00%		280		100.00%	
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	Rp 0	2	Rp 0	2	Rp 727.209.087	2	Rp 100.932.060	0	Rp 68.157.500	2	Rp 173.536.000	0	Rp 362.484.100	4	Rp 705.109.660	100.00%	96.96%	6	Rp 705.109.660	100.00%	0.00%
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	Rp 0	1	Rp 0	2	Rp 77.150.000	1	Rp 11.850.000	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 56.960.000	2	Rp 68.810.000	100.00%	89.19%	3	Rp 68.810.000	100.00%	0.00%
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 14.412.500	1	Rp 14.412.500	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 14.412.500	100.00%	100.00%	2	Rp 14.412.500	100.00%	0.00%
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	Rp 0	1	Rp 0	1	Rp 46.675.000	0	Rp 46.095.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 46.095.000	0.00%	98.76%	1	Rp 46.095.000	100.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPd/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1	Rp 0	4	Rp 0	2	Rp 588.971.587	0	Rp 28.574.560	0	Rp 68.157.500	2	Rp 173.536.000	0	Rp 305.524.100	2	Rp 575.792.160	100.00%	97.76%	6	Rp 575.792.160	100.00%	0.00%
Persentase kesesuaian dokumen RKPd terhadap RKPd	%	100	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 571.000.213	100	Rp 63.866.000	100	Rp 87.009.750	100	Rp 90.270.000	100	Rp 313.597.400	400	Rp 554.743.150	100.00%	97.15%	400	Rp 554.743.150	100.00%	0.00%
Persentase konsistensi antara dokumen RKPd	%	100		0		100		100		0		0		100		200		100.00%		200		100.00%	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 274.912.620	0	Rp 35.524.500	1	Rp 15.830.000	1	Rp 64.430.000	0	Rp 150.557.900	2	Rp 266.342.400	100.00%	96.88%	2	Rp 266.342.400	100.00%	0.00%
Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	kerjasama	1	Rp 0	3	Rp 0	1	Rp 11.370.000	0	Rp 0	1	Rp 11.370.000	0	Rp 0	1	Rp 0	2	Rp 11.370.000	100.00%	100.00%	5	Rp 11.370.000	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	Rp 0	4	Rp 0	4	Rp 284.717.593	1	Rp 28.341.500	1	Rp 59.809.750	1	Rp 25.840.000	1	Rp 163.039.500	4	Rp 277.030.750	100.00%	97.30%	8	Rp 277.030.750	100.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																		100.00%					
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																		5T					

Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 4.028.746.548	0	Rp 548.154.352	0	Rp 1.446.298.139	0	Rp 856.781.950	100	Rp 1.116.007.440	100	Rp 3.967.241.881	100.00%	98.47%	200	Rp 3.967.241.881	0.00%	0.00%
Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra	Persen	100		100		100		0		0		0		100		100		100.00%		200		100.00%	
Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renja	Persen			0		100		0		0		0		100		100		100.00%		100		100.00%	
Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap	persen	100	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 1.086.167.404	0	Rp 393.314.300	0	Rp 116.917.250	0	Rp 114.717.500	100	Rp 416.861.854	100	Rp 1.041.810.904	100.00%	95.92%	100	Rp 1.041.810.904	100.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	28	Rp 0	0	Rp 0	28	Rp 7.125.000	0	Rp 1.425.000	0	Rp 1.900.000	0	Rp 1.900.000	28	Rp 1.900.000	28	Rp 7.125.000	100.00%	100.00%	28	Rp 7.125.000	100.00%	0.00%
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	26	Rp 0	0	Rp 0	26	Rp 7.125.000	0	Rp 0	26	Rp 2.137.500	0	Rp 2.850.000	26	Rp 1.900.000	52	Rp 6.887.500	100.00%	96.67%	52	Rp 6.887.500	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	Rp 0	4	Rp 0	4	Rp 129.125.000	1	Rp 68.614.650	1	Rp 19.900.000	1	Rp 19.900.000	1	Rp 19.900.000	4	Rp 128.314.650	100.00%	99.37%	8	Rp 128.314.650	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	Rp 0	4	Rp 0	4	Rp 69.500.000	1	Rp 2.375.000	1	Rp 22.637.500	1	Rp 19.612.500	1	Rp 24.375.000	4	Rp 69.000.000	100.00%	99.28%	8	Rp 69.000.000	100.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			Rp 0	0	Rp 0	11	Rp 406.442.404	0	Rp 160.666.500	11	Rp 6.487.500	11	Rp 2.850.000	0	Rp 229.593.854	22	Rp 399.597.854	100.00%	98.32%	22	Rp 399.597.854	0.00%	0.00%
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	perangkat Daerah	9	Rp 0	0	Rp 0	9	Rp 23.750.000	9	Rp 5.462.500	9	Rp 5.225.000	10	Rp 6.650.000	10	Rp 6.412.500	38	Rp 23.750.000	100.00%	100.00%	38	Rp 23.750.000	100.00%	0.00%
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	perangkat Daerah	9	Rp 0	0	Rp 0	9	Rp 313.800.000	9	Rp 125.570.650	9	Rp 43.792.250	10	Rp 42.255.000	10	Rp 98.718.000	38	Rp 310.335.900	100.00%	98.90%	38	Rp 310.335.900	100.00%	0.00%
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	4	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 129.300.000	1	Rp 29.200.000	1	Rp 14.837.500	1	Rp 18.700.000	1	Rp 34.062.500	4	Rp 96.800.000	100.00%	74.86%	4	Rp 96.800.000	100.00%	0.00%
Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap	Persen	100	Rp 0	200	Rp 0	100	Rp 1.005.979.475	0	Rp 49.412.100	0	Rp 486.838.084	0	Rp 54.891.000	100	Rp 410.665.826	100	Rp 1.001.807.010	100.00%	99.59%	300	Rp 1.001.807.010	100.00%	0.00%
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	8	Rp 0	1	Rp 0	8	Rp 147.600.000	0	Rp 13.144.000	7	Rp 54.200.000	0	Rp 36.175.000	1	Rp 44.075.000	8	Rp 147.594.000	100.00%	100.00%	9	Rp 147.594.000	100.00%	0.00%

	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	Rp 0	1	Rp 0	3	Rp 4.750.000	3	Rp 1.187.500	3	Rp 1.662.500	3	Rp 950.000	3	Rp 950.000	3	Rp 4.750.000	100.00%	100.00%	3	Rp 4.750.000	100.00%	0.00%
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4	Rp 0	1	Rp 0	4	Rp 400.000.000	0	Rp 0	2	Rp 199.390.854	0	Rp 0	2	Rp 199.656.366	4	Rp 399.047.220	100.00%	99.76%	5	Rp 399.047.220	100.00%	0.00%
	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap	Persen	100	Rp 0	200	Rp 0	100	Rp 1.936.599.669	0	Rp 105.427.952	0	Rp 842.542.805	0	Rp 687.173.450	100	Rp 288.479.760	100	Rp 1.923.623.967	100.00%	99.33%	300	Rp 1.923.623.967	100.00%	0.00%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen	5	Rp 0	3	Rp 0	8	Rp 1.072.200.000	1	Rp 39.930.252	3	Rp 557.965.728	3	Rp 352.481.296	1	Rp 120.368.415	8	Rp 1.070.745.691	100.00%	99.86%	11	Rp 1.070.745.691	100.00%	0.00%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	3	Rp 0	6	Rp 0	3	Rp 28.391.569	0	Rp 18.160.200	3	Rp 0	3	Rp 0	0	Rp 8.388.500	6	Rp 26.548.700	100.00%	93.51%	12	Rp 26.548.700	100.00%	0.00%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	3	Rp 0	8	Rp 0	3	Rp 20.908.100	1	Rp 5.000.000	3	Rp 7.000.000	3	Rp 0	3	Rp 8.000.000	10	Rp 20.000.000	100.00%	95.66%	18	Rp 20.000.000	100.00%	0.00%
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	Rp 0	5	Rp 0	3	Rp 364.025.000	0	Rp 15.525.000	1	Rp 116.730.979	1	Rp 117.373.954	1	Rp 113.222.845	3	Rp 362.852.778	100.00%	99.68%	8	Rp 362.852.778	100.00%	0.00%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen	3	Rp 0	1	Rp 0	3	Rp 224.000.000	0	Rp 0	2	Rp 123.833.598	1	Rp 99.850.050	0	Rp 0	3	Rp 223.683.648	100.00%	99.86%	4	Rp 223.683.648	100.00%	0.00%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	3	Rp 0	4	Rp 0	3	Rp 20.000.000	0	Rp 6.000.000	3	Rp 5.000.000	3	Rp 0	0	Rp 9.000.000	6	Rp 20.000.000	100.00%	100.00%	10	Rp 20.000.000	100.00%	0.00%
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	3	Rp 0	4	Rp 0	3	Rp 21.050.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 5.000.000	3	Rp 0	3	Rp 6.000.000	10	Rp 17.000.000	100.00%	80.76%	14	Rp 17.000.000	100.00%	0.00%
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	Rp 0	6	Rp 0	1	Rp 186.025.000	0	Rp 14.812.500	0	Rp 27.012.500	1	Rp 117.468.150	0	Rp 23.500.000	1	Rp 182.793.150	100.00%	98.26%	7	Rp 182.793.150	100.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																			100.00%					
Predikat Kinerja yang Dievaluasi:																			ST					

	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	3	Rp 0	4	Rp 0	3	Rp 20.000.000	0	Rp 6.000.000	3	Rp 5.000.000	3	Rp 0	0	Rp 9.000.000	6	Rp 20.000.000	100.00%	100.00%	10	Rp 20.000.000	100.00%	0.00%	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	3	Rp 0	4	Rp 0	3	Rp 21.050.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 5.000.000	3	Rp 0	3	Rp 6.000.000	10	Rp 17.000.000	100.00%	80.76%	14	Rp 17.000.000	100.00%	0.00%	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	Rp 0	6	Rp 0	1	Rp 186.025.000	0	Rp 14.812.500	0	Rp 27.012.500	1	Rp 117.468.150	0	Rp 23.500.000	1	Rp 182.793.150	100.00%	98.26%	7	Rp 182.793.150	100.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																			100.00%						
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																			ST						
	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	Persen	78%	Rp 0	142,86	Rp 0	72	Rp 621.187.603	0	Rp 32.837.500	0	Rp 260.672.725	0	Rp 23.252.500	87,76	Rp 277.956.200	87,76	Rp 594.718.925	100.00%	95.74%	230,62	Rp 594.718.925	0.00%	0.00%	
	Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai	Persen	98%		180		92		0		0		0		92,5		92,5		100.00%		272,5		0.00%	0.00%	
	Persentase hasil penelitian /kajian bidang	Persen	98%	Rp 0	0	Rp 0	92	Rp 264.507.500	0	Rp 8.312.500	0	Rp 128.786.725	0	Rp 7.362.500	92,5	Rp 117.457.200	92,5	Rp 261.918.925	100.00%	99.02%	92,5	Rp 261.918.925	0.00%	0.00%	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	Laporan	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 264.507.500	0	Rp 8.312.500	0	Rp 128.786.725	0	Rp 7.362.500	1	Rp 117.457.200	1	Rp 261.918.925	100.00%	99.02%	1	Rp 261.918.925	0.00%	0.00%
	Persentase Hasil Penelitian/ Pengembangan/	Persen	98%	Rp 0	90	Rp 0	92	Rp 356.680.103	0	Rp 24.525.000	0	Rp 131.886.000	0	Rp 15.890.000	92,5	Rp 160.499.000	92,5	Rp 332.800.000	100.00%	93.30%	182,5	Rp 332.800.000	0.00%	0.00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	Dokumen	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 356.680.103	0	Rp 24.525.000	0	Rp 131.886.000	0	Rp 15.890.000	1	Rp 160.499.000	1	Rp 332.800.000	100.00%	93.30%	1	Rp 332.800.000	0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																			100.00%						
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																			ST						
Total:																									
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																			92.75%						
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																			ST						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																			93.75%						
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																			ST						
Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																			100.00%						
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																			ST						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnyakemakmuran warga (*welfare state*).

Dalam menjalankan perannya tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo diantaranya yaitu :

1. Perubahan yang sangat cepat pada lingkungan strategis perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pembangunan daerah;
2. Tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Belum terintegrasi serta belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah;

4. Kualitas koordinasi dan kesepahaman antar PD, serta komitmen masing-masing PD dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal;
5. Kualitas SDM Aparatur yang belum memenuhi kebutuhan dasar organisasi Bappeda;
6. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Selain tantangan sebagaimana diatas, terdapat juga peluang yang teridentifikasi mampu dimanfaatkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanannya. Diantaranya adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan daerah;
2. Tersedianya kualitas SDM aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah;
3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
4. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
5. Tersedianya peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
7. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Terdesentralisasinya sistem perencanaan pembangunan daerah yang memungkinkan Bappeda untuk lebih mudah berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
9. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial/LSM dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui

peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, koordinasi dan komunikasi.

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Per Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2023			PROGRAM	REALISASI ANGGARAN 2023		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,8
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47
Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID)	72%	72%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74
						18.481.816.138,00	17.953.984.916,25	

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari BAPPEDA. Disamping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, Bappeda merencanakan kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Kab Sidoarjo Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUDUL KAJIAN/DOKUMEN	NILAI KAJIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Proses Bisnis	25.000.000
		Penyusunan Renstra	20.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	60.000.000
		RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	80.000.000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penyusunan Pohon Kinerja Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Konsistensi RPJMD, Renstra, Renja dan target kinerja IKU dan IKD RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan narsum	100.000.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2023	50.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	100.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Implementasi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	100.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Sidoarjo	65.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Potensi Pengembangan Industri Makanan dan Minuman sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo	100.000.000

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUDUL KAJIAN/DOKUMEN	NILAI KAJIAN
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Pengembangan Komoditi Bawang Merah sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	100.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Pengembangan Komoditi Kedelai sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Analisa Pengelolaan PJU pada Unit Pelayanan Perkotaan di Kab Sidoarjo	100.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sikronisasi Program Kegiatan Komisi Irigasi	30.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Transformasi Digital di Kabupaten Sidoarjo	100.000.000
		Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2030	100.000.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pendampingan Penyempurnaan Pelaporan Indeks Inovasi Daerah	25.000.000

Selain merencanakan kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, review terhadap rancangan awal RKPd tahun 2024 juga menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 untuk dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Review Indikator Target dan Anggaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo dilakukan Tahun 2023, dimana hasil review tersebut terdokumentasi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 (Review Tahun 2023) dan digunakan untuk pedoman dalam menentukan anggaran setiap tahunnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Review dilakukan dari hasil evaluasi capaian target masing-masing indikator tahun sebelumnya serta mempertimbangkan adanya bencana pandemi Covid-19 serta kondisi keuangan daerah pada tahun 2023. Alokasi anggaran per sasaran pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

PROGRAM	REALISASI ANGGARAN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,8
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74
	18.481.816.138,00	17.953.984.916,25	

Sumber : Siksda Tahun 2023

*Catatan :

Prosentase Anggaran = $\text{Anggaran} / \text{Belanja Langsung} \times 100\%$

Alokasi per sasaran pembangunan diperoleh dari anggaran tiap indikator tahun 2023 dibagi dengan anggaran Belanja Operasi tahun 2023. Anggaran Belanja Operasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sebesar Rp. 18.872.496.301,00

Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Alokasi anggaran terbanyak pada indikator Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76 % yaitu sebesar 97.96%.

2.4. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Kondisi permasalahan tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan Bappeda, diharapkan semua program dan kegiatan mampumengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Bappeda. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu mengetahui isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksinya:

1. Masih belum optimalnya kualitas perencanaan
2. Belum optimalnya pengendalian perencanaan terhadap tata ruang
3. Belum optimalnya fungsi kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah
4. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

2.4.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Bappeda berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Bappeda Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang disyaratkan.

Keberadaan Sekretariat (Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional), Bidang Perencana (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah yang masing-masing terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional), telah disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi yang mendukung fungsi-fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dalam mengantisipasi perubahan-

perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Sidoarjo masih terdapat Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong bagi Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain :

1. Adanya rangkap jabatan oleh tenaga fungsional perencana
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan antra PD dan sistem koordinasi belum terintegrasi secara online;
3. Masih rendah akurasi data perencanaan karena kompleksitas data perencanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
4. Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim;
5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas PD yang masih lemah;
6. Keterbatasan waktu di dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan faktor pendorong Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan formal
2. Tersedianya perangkat TIK yang mendukung peningkatan kinerja
3. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi perencanaan pembangunan.
5. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas PD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo
6. Usaha untuk melakukan efisiensi waktu proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap PD di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2.4.2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemkab Sidoarjo

Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, jika memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai

masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016 – 2023. Dan juga prakiraan dinamika kondisi, masalah serta tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2023 – 2026. Selain itu, mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2024, maka rumusan visi Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2023 – 2026, yaitu:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di atas, menghasilkan pokok-pokok kunci dari pernyataan visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana dengan penjabaran tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Penjabaran Visi Kabupaten Sidoarjo

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”	
Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam VISI ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
Sidoarjo Maju	Sidoarjo Maju merupakan manifestasi dari diksi “Menjemput Perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.

<p>Sidoarjo Berkarakter</p>	<p>Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kedepan.</p>
<p>Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.</p>

Sebagai penjabaran dari Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023 yaitu

”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”

maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi merupakan penjabaran dari Visi dan setiap kata kunci dalam visi dijabarkan ke dalam misi.

Unsur Visi **“Sidoarjo Sejahtera”** dijabarkan menjadi **satu misi** yaitu :

Misi 2 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Unsur Visi **“Sidoarjo Maju”** dijabarkan menjadi **satu misi** yaitu :

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

Unsur Visi **“Sidoarjo Berkarakter”** dijabarkan menjadi **dua misi** yaitu :

Misi 4 Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.

Misi 5 Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Unsur Visi “**Pembangunan Berkelanjutan**” dijabarkan menjadi **satu misi** yaitu :

Misi 3 Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah.

2.4.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga *Think Tank*, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo diantaranya yaitu :

1. Perubahan yang sangat cepat pada lingkungan strategis perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pembangunan daerah;
2. Tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Belum terintegrasi serta belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Kualitas koordinasi dan kesepahaman antar PD, serta komitmen masing-masing PD dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal;
5. Kualitas SDM Aparatur yang belum memenuhi kebutuhan dasar organisasi Bappeda;
6. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Selain tantangan sebagaimana diatas, berikut merupakan peluang yang teridentifikasi mampu dimanfaatkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanannya. Diantaranya adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan daerah;
2. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan;
3. Tersedianya kualitas SDM aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah;
4. Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo;

5. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
6. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
7. Tersedianya peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
8. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
9. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
10. Terdesentralisasinya sistem perencanaan pembangunan daerah yang memungkinkan Bappeda untuk lebih mudah berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
11. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial/LSM dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perkembangan Bappeda Kabupaten Sidoarjo kedepannya diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki. BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan juga inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan serta untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Bappeda dapat diharapkan juga dapat mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan; memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis; koordinasi dan komunikasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,

teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo yang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026, maka Untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka posisi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026 terletak pada :

- Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

- Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha.

- Sasaran 1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital.

- Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki 4 Program, 14 Kegiatan, 64 Sub Kegiatan. Berikut uraian dari setiap program, kegiatan serta sub kegiatan dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**B. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah.
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah.
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah.

C. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
 - b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD.
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.
 - g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.
 - c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang di usulkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sbb :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						17.707.176.138,00								4.060.300.000,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.707.176.138,00							4.060.300.000,00		
	5.01	PERENCANAAN						16.985.294.638,00							4.054.800.000,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.611.016.052,00						-	27.500.000,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	78.450.000,00						-	3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	67.950.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	5.250.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8 Laporan	5.250.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	8.191.691.894,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		4.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	8.176.606.910,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.934.984,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8.700.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-	-	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					56 Orang	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-	-	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.280.610.094,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-	-	9.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	6.742.251,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2 Paket	18.751.674,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	1.258.629,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	220.750.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola p emerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	12.025.040,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola p emerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	592.482.500,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				160 Laporan	425.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	209.303.820,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-	-	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14 Unit	209.303.820,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					605.204.029,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4000 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	248.564.029,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola p emerintaha n yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	354.840.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola p emerintaha n yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan</i>	-			100 %	324.256.215,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo	-	4.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	93.500.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel														

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	230.756.215,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUTAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	SARAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKORD SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PEMANGGUK DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase kesesuaian RKPD terhadap dokumen RPJMD Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah</i>	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	2.196.404.747,00						100 persen 100 persen	9.700.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan</i>	-			2 Dokumen	1.322.291.736,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 6. Percepatan transformasi digital yang dimulai dari pemerintah daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien serta inovasi pelayanan publik	Kabupaten Sidoarjo	-	5.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	118.532.700,00	Kab. Sidoarjo, Sidoarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 6. Percepatan transformas i digital yang dimulai dari pemerintah daerah yang berorientasi pada pelak sanaan pe merintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien serta inovasi pelayanan publik	Kabupaten Sidoarjo		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	116.750.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningka tan tatakelola p emerintah an yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjut an	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	166.932.700,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningka tan tatakelola p emerintah n yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjut an	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	920.076.336,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningka tan tatakelola p emerintah n yang bersih melalui Percepatan transformas i digital dan pelayanan publik berkualitas serta imple mentasi pe mbangunan berkelanjut an	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola	-			4 Dokumen	89.522.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo	-	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				100 Orang	89.522.940,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD Persentase konsistensi antara dokumen RKPD terhadap dokumen KUA-PPAS dan APBD	-			100 % 100 %	784.590.071,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo	-	3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				3 Laporan	341.299.100,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo	1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														

			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	75.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	368.290.971,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	4.277.873.839,00						-	4.017.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	-			100 %	1.670.507.108,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo	-	8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				29 Dokumen	23.310.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	Kabupaten Sidoarjo		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	179.000.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	329.750.000,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang</i>				2 Laporan	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan	-		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H								18.859.760.451,00							4.060.300.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Bupati Nomor 000.7/1924/438.6.1/2024 tentang PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2025 hasil verifikasi sebesar Rp. 18.859.760.451,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Anggaran Bappeda dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2026 yaitu Nilai Sakip Komponen Perencanaan. Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, Maret 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO



Dr. HERI SOESANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 1988 03 1 002